



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Perwako No 42 Tahun 2016 Bagian Ke 3 Pasal 5 Tentang Tufoksi Dinas PUPR (Studi Kasus Dinas Pupr Kota Prabumulih)

Bristian Firdaus^{*1}, Achmad Muftizar², Aris Munandar³

^{1,2,3}Universitas Tamansiswa Palembang

Alamat: Jl. Tamansiswa No. 261 (Lapangan Hatta) Ilir Timur I Kota Palembang

Korespondensi penulis: bristianfirdaus@unitaspalembang.ac.id

Abstract; *This study aims to describe the Factors Affecting the Implementation of Perwako No. 42 of 2016 Part 3 Article 5 concerning the Duties of the PUPR Service (Case Study of the Public Works Office of Prabumulih City). This research was conducted for three months using a descriptive qualitative approach. Data was collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are carried out by presenting data, reducing data, and drawing conclusions. The results showed that one of the problems faced by PUPR employees was that under certain conditions they could not always follow the existing rules or main tasks and functions, sometimes employees had to be more flexible in adjusting to the conditions in the field and sometimes they did not follow the main tasks and functions. which has been made. Perwako No. 42 of 2016 Part 3 Article 5 Regarding the Duties of the PUPR Service which was later changed to Mayor Regulation (PERWALI) of Prabumulih City No. 10 of 2017 is a good policy, it's just that how in its implementation it really depends on PUPR employees, because the policy is just a rule made based on a mutual agreement to be obeyed. The work environment at the PUPR Office is quite good, this can be seen from the work attitude of the employees in the office, then supported by adequate facilities and infrastructure, this indicates empirically, the work environment of the PUPR office is very supportive to establish and improve employee performance. The employee's work space is quite spacious, clean and equipped with other facilities, with this support, it is certain that it will provide comfort for employees in completing all work and office tasks. Then supported by the ability of employees in teamwork, employees are able to understand each other's character with each of its weaknesses and strengths so that employees are able to cooperate in completing a job that is the goal or target of the organization. The situation on the ground, which is sometimes different from what was planned and targeted from the start, makes the implementation of the main tasks and functions of PUPR employees unable to carry out properly.*

Keywords: *Implementation, Main Tasks and Functions, PUPR*

Abstrak; Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mendeskripsikan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Perwako No. 42 Tahun 2016 Bagian 3 Pasal 5 Tentang Tugas Dinas PUPR (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih). Penelitian Ini Dilakukan Selama Tiga Bulan Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan Data Dilakukan Melalui Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data Dilakukan Dengan Cara Penyajian Data, Reduksi Data, Dan Penarikan Simpulan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Salah Satu Permasalahan Yang Dihadapi Pegawai PUPR Adalah Pada Kondisi Tertentu Tidak Selalu Dapat Mengikuti Aturan Atau Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Ada, Terkadang Pegawai Harus Lebih Fleksibel Dalam Menyesuaikan Diri Dengan Kondisi Di Lapangan Dan Terkadang Tidak Mengikuti Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Telah Dibuat. Perwako No. 42 Tahun 2016 Bagian 3 Pasal 5 Tentang Tugas Dinas PUPR Yang Kemudian Diubah Menjadi Peraturan Wali Kota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 10 Tahun 2017 Merupakan Suatu Kebijakan Yang Baik, Hanya Saja Bagaimana Dalam Pelaksanaanya Sangat Tergantung Pada Pegawai PUPR, Karena Kebijakan Tersebut Hanyalah Sebuah Aturan Yang Dibuat Berdasarkan Kesepakatan Bersama Untuk Dipatuhi. Lingkungan Kerja Pada Kantor PUPR Sudah Cukup Baik, Hal Ini Dapat Dilihat Dari Sikap Kerja Para Pegawai Yang Ada Di Kantor Tersebut, Kemudian Didukung Dengan Sarana Dan Prasarana Yang Memadai, Hal Ini Mengindikasikan Secara Empiris, Lingkungan Kerja Kantor PUPR Sangat Mendukung Untuk Membentuk Dan Meningkatkan Kinerja Pegawai. Ruang Kerja Pegawai Cukup Luas, Bersih Dan Dilengkapi Dengan Fasilitas Lainnya, Dengan Adanya Dukungan Tersebut, Sudah Pasti Akan Memberikan Kenyamanan Bagi

Pegawai Dalam Menyelesaikan Segala Pekerjaan Dan Tugas Kantor. Kemudian Didukung Dengan Kemampuan Pegawai Dalam Bekerja Sama Dalam Tim, Pegawai Mampu Memahami Karakter Masing-Masing Dengan Setiap Kekurangan Dan Kelebihannya Sehingga Pegawai Mampu Bekerja Sama Dalam Menyelesaikan Suatu Pekerjaan Yang Menjadi Tujuan Atau Sasaran Organisasi. Situasi Di Lapangan Yang Terkadang Berbeda Dengan Apa Yang Direncanakan Dan Ditargetkan Sejak Awal Membuat Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pegawai PUPR Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Tugas Pokok Dan Fungsi, PUPR*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah adalah salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi administratif di tingkat regional. Di Indonesia, negara ini dibagi menjadi beberapa tingkatan administrasi, yaitu provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap tingkat pemerintahan daerah ini memiliki peran dan tanggung jawab khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah bertugas untuk mengelola urusan dan kebijakan tertentu yang telah didelegasikan kepada mereka, dengan mempertimbangkan kebijakan, inisiatif, dan kapasitas lokal. Tugas-tugas ini mencakup berbagai aspek pengelolaan dan pelayanan publik yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Dengan demikian, pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal.

Pemerintahan daerah meliputi dua jenis urusan: urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah jenis urusan yang harus dilaksanakan oleh semua daerah tanpa terkecuali, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang dapat dipilih dan dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal yang ada di daerah tersebut.

Pemerintahan di tingkat daerah merupakan suatu sistem administrasi yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Kompleksitas ini tampak dari berbagai aspek, termasuk tujuan dan fungsi utama pemerintahan daerah, struktur organisasi yang ada, serta sistem kepegawaian dan keuangan yang diterapkan. Selain itu, kompleksitas juga meliputi peralatan dan teknologi yang digunakan dalam operasional pemerintahan, serta jenis klien yang dilayani dan ruang lingkup wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan aspek ini saling terkait dan mempengaruhi efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kelembagaan yang besar di pemerintahan daerah seringkali menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar organisasi. Keberagaman dan jumlah organisasi yang banyak dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih atau overlap dalam pelaksanaan tugas. Hal ini berpotensi menciptakan duplikasi pekerjaan yang seharusnya bisa dihindari, sehingga menyulitkan koordinasi dalam implementasi kebijakan publik. Dampak dari duplikasi ini tidak hanya membuat proses koordinasi menjadi lebih rumit, tetapi juga dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang berharga. Selain itu, keberagaman organisasi yang ada dapat menambah kemungkinan munculnya konflik di antara berbagai organisasi kelembagaan, mengingat adanya perbedaan dalam tujuan, fungsi, dan kepentingan masing-masing.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah elemen esensial dalam pengelolaan organisasi yang merujuk pada aturan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1215), "tugas pokok" diartikan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai. Sementara itu, "fungsi" diartikan sebagai pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan demikian, Tupoksi dapat disimpulkan sebagai kombinasi dari sasaran utama yang harus dicapai dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh organisasi. Ini mencakup pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab serta pekerjaan yang menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Tugas pokok dan fungsi dinas PUPR Kota Prabumulih yaitu dalam pengurusan jalan, jembatan serta penataan ruang. Adanya tugas pokok dan fungsi tersebut diharapkan dinas PUPR bisa bekerja dengan maksimal. Namun pada faktanya masih banyak yang belum maksimal sebagai salah satu contoh yaitu jalan yang terbentang sekitar 22 kilometer dari tugu air mancur Kecamatan Cambai hingga Tugu Nanas Kecamatan Prabumulih Barat tersebut dipenuhi lubang yang menganga. Kedalaman lubang di jalan bahkan sangat parah dan hanya bisa dilewati kendaraan-kendaraan besar dan tinggi.

Selain daripada jalan, ada juga jembatan yang rusak yaitu embatan berloksi di Jalan Tenggamus, Kelurahan Muaradua, Kecamatan Prabumulih Timur, dan telah dilakukan pembangunan pada awal 2019 mendatang. Dua kasus di atas mencerminkan beberapa pekerjaan dinas PUPR tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian dan pengkajian mengenai tugas pokok dinas PUPR Kota Prabumulih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tidak yang terdapat dalam Perwako No 42 Tahun 2016 Bagian Ke 3 Pasal 5 Tentang Tufoksi Dinas PUPR.

Untuk melihat lebih jauh mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Perwako No. 42 yang berhubungan dengan tupoksi pegawai PUPR maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Perwako No 42 Tahun 2016 Bagian Ke 3 Pasal 5 Tentang Tufoksi Dinas PUPR (Studi Kasus Dinas PUPR Kota Prabumulih)"**

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Dalam arti luas, kebijakan dapat diartikan sebagai proses yang dimulai setelah keluarnya undang-undang atau peraturan tertentu. Implementasi kebijakan, dalam konteks ini, merujuk pada pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang melibatkan berbagai aktor dan satuan kerja dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Budi Winarno, 2007: 144-145), implementasi bukan hanya sekadar tindakan, melainkan mencakup serangkaian elemen yang saling terkait, yaitu input, proses, output, dan outcome. Input melibatkan sumber daya yang diperlukan, proses mencakup langkah-langkah yang diambil selama pelaksanaan, output adalah hasil langsung dari proses tersebut, dan outcome merupakan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diimplementasikan.

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan. Ini adalah fase di mana kebijakan atau undang-undang dioperasionalisasikan melalui program kegiatan dan keterlibatan aktor-aktor terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran yang telah disepakati dan memastikan

bahwa kebijakan tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota (Perwako), peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Teori ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami berbagai elemen yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, ada tiga aspek utama yang diperhatikan:

1. Karakteristik Masalah (Tractability of the Problems). Aspek ini mengacu pada sejauh mana masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan tersebut dapat dipecahkan dengan pendekatan yang ada. Masalah yang kompleks atau sulit dipecahkan sering memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan strategi yang lebih canggih untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif.
2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang (Ability of Statute to Structure Implementation). Ini merujuk pada sejauh mana kebijakan atau undang-undang tersebut dirancang dengan baik untuk memandu pelaksanaan di lapangan. Kebijakan yang jelas dan terperinci, dengan pedoman yang spesifik dan mekanisme pengawasan yang efektif, cenderung lebih mudah diimplementasikan. Karakteristik ini mencakup aspek seperti kejelasan tujuan kebijakan, detail prosedur implementasi, serta alokasi sumber daya yang memadai.
3. Variabel Lingkungan (Nonstatutory Variables Affecting Implementation):. Faktor ini mencakup berbagai elemen eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tetapi tidak diatur secara langsung oleh undang-undang atau peraturan. Ini termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di lingkungan tempat kebijakan diimplementasikan. Variabel ini dapat berupa dukungan masyarakat, stabilitas politik, sumber daya yang tersedia, serta adanya hambatan atau tantangan yang mungkin muncul di luar kontrol langsung dari kebijakan.

Dengan menganalisis ketiga aspek ini, peneliti dapat memahami dengan lebih baik bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi pelaksanaan Perwako dan mengidentifikasi potensi tantangan serta peluang untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian umumnya terbagi menjadi dua jenis utama: penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, meskipun ada juga pendekatan kombinasi yang menggabungkan keduanya. Penelitian kualitatif fokus pada kedalaman analisis, sering kali melalui wawancara mendalam, observasi, atau studi kasus, dengan tujuan untuk memahami fenomena dari sudut pandang yang lebih subjektif dan holistik. Sebaliknya, penelitian kuantitatif mengutamakan penggunaan instrumen seperti kuesioner atau angket yang menghasilkan data numerik. Hasil penelitian kuantitatif biasanya berupa angka-angka yang kemudian dianalisis secara statistik.

Dalam konteks penelitian kualitatif deskriptif, metode ini sangat cocok untuk digunakan. Menurut Moleong (2002:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kondisi nyata di lapangan atau realitas yang ada, dengan bentuk deskripsi yang berupa uraian kata-kata atau gambar. Hal ini memungkinkan peneliti untuk

memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti, dengan fokus pada makna dan konteks daripada sekadar data numerik. Penelitian kualitatif deskriptif memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa atau kondisi terjadi, sehingga sangat berguna untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang kompleks dan subtle dari suatu fenomena. Penelitian ini mengungkapkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Perwako No 42 Tahun 2016 Bagian Ke 3 Pasal 5 Tentang Tufoksi Dinas PUPR (Studi Kasus Dinas PUPR Kota Prabumulih)”

HASIL PENELITIAN

Implementasi Perwako No 42 Tahun 2016 Bagian Ke 3 Pasal 5 Tentang Tufoksi Dinas PUPR (Studi Kasus Dinas PUPR Kota Prabumulih)

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Karakteristik Masalah

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah ketidakmampuan untuk selalu mematuhi aturan atau tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan. Dalam situasi tertentu, pegawai sering kali harus bersikap fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang ada, meskipun hal ini terkadang bertentangan dengan Tupoksi yang telah dirumuskan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pedoman resmi, seperti Perwako No 42 Tahun 2016 tentang Tupoksi Dinas PUPR, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 10 Tahun 2017, dan praktik nyata di lapangan. Penyesuaian terhadap kondisi lapangan sering kali diperlukan untuk menangani masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, menunjukkan perlunya evaluasi dan revisi terhadap kebijakan untuk mencerminkan realitas operasional yang lebih baik..

Karakteristik Kebijakan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 10 Tahun 2017, yang merupakan perubahan dari Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih, telah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Meskipun kebijakan ini sudah disusun dengan baik, pelaksanaannya sering kali sangat bergantung pada sikap dan kompetensi pegawai PUPR. Kebijakan ini, meskipun dirancang untuk memberikan panduan dan struktur, tetap memerlukan penerapan yang konsisten dan adaptasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, meskipun penting, tidak selalu dapat secara otomatis diimplementasikan tanpa mempertimbangkan faktor manusia dan situasi yang dinamis. Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen dan

fleksibilitas dari pegawai PUPR untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan..

Lingkungan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Prabumulih sudah cukup memadai. Penilaian ini didasarkan pada observasi terhadap sikap kerja pegawai yang menunjukkan sikap positif dan profesional di kantor. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai juga berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang kondusif. Ketersediaan fasilitas yang cukup dan kondisi kerja yang mendukung ini menunjukkan bahwa secara empiris, lingkungan kerja di Dinas PUPR berperan penting dalam membentuk dan meningkatkan kinerja pegawai. Lingkungan yang baik tidak hanya mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja pegawai, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas kerja mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Faktor Pendukung

Dalam penelitian ini, salah satu faktor pendukung utama adalah adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Fasilitas yang baik tidak hanya membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman tetapi juga mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mendukung pencapaian prestasi kerja yang sesuai dengan harapan. Sarana dan prasarana yang baik merupakan penunjang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, karena fasilitas yang memadai memungkinkan pegawai untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif, serta mencapai tujuan atau target kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Ruangan kerja yang cukup luas, bersih, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan memberikan kenyamanan bagi pegawai saat menyelesaikan pekerjaan dan tugas kantor. Dukungan fasilitas ini memastikan bahwa pegawai dapat bekerja dalam lingkungan yang mendukung produktivitas dan kualitas kerja. Selain itu, kemampuan pegawai dalam bekerja dalam tim juga berperan penting. Pegawai yang mampu memahami karakter masing-masing rekan kerja, dengan segala kelebihan dan kekurangan, dapat menjalin kerjasama yang baik dalam menyelesaikan tugas. Kerjasama yang efektif dalam tim berkontribusi pada pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, sehingga menghasilkan hasil kerja yang optimal dan mendukung kesuksesan lembaga secara keseluruhan

.

Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa situasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan rencana dan target awal yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam prakteknya, kondisi lapangan yang dinamis dan sering berubah membuat pegawai sulit untuk selalu mengikuti dan menjalankan tugas pokok serta fungsi yang telah direncanakan. Akibatnya, pelaksanaan tugas tidak selalu dapat dilakukan dengan baik, mengingat adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang mungkin tidak terduga. Situasi ini menyoroti pentingnya

fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas agar pegawai dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi lapangan dan tetap mencapai hasil yang diinginkan

KESIMPULAN

Implementasi Perwako No 42 Tahun 2016 Bagian Ke 3 Pasal 5 Tentang Tufoksi Dinas PUPR (Studi Kasus Dinas PUPR Kota Prabumulih)

Karakteristik Masalah

Salah satu masalah yang dihadapi pegawai PUPR yaitu dalam kondisi tertentu tidak bisa selalu mengikuti aturan atau tugas pokok dan fungsi yang ada dimana, kadang pegawai harus lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan dan ini kadang juga tidak mengikuti tugas pokok dan fungsi yang telah dibuat.

Karakteristik Kebijakan

Perwako No 42 Tahun 2016 Bagian Ke 3 Pasal 5 Tentang Tufoksi Dinas PUPR yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 10 Tahun 2017 merupakan kebijakan yang sudah bagus, hanya saja bagaimana dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada pegawai PUPR, karena kebijakan hanyalah sebuah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk ditaati.

Lingkungan

Lingkungan kerja yang ada di Dinas PUPR sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari bagaimana sikap kerja pegawai yang ada di Kantor, kemudian di dukung oleh sarana dan prasarana yang cukup, hal ini menandakan secara empiric, lingkungan kerja kantor PUPR sangat mendukung untuk membentuk dan meningkatkan kiner pegawai.

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Faktor Pendukung

Ruangan kerja pegawai yang cukup luas, bersih dan dilengkapi fasilitas-fasilitas lainnya, dengan adanya dukungan tersebut, bisa dipastikan akan memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam setiap menyelesaikan semua pekerjaan dan tugas kantor. Kemudian di dukung oleh kemampuan pegawai dalam kerja tim, pegawai mampu memahami karakter masing-masing dengan setiap kekurangan dan kelebihanannya sehingga para pegawai mampu menjalin kerjasama dalam menyelesaikan satu pekerjaan yang menjadi tujuan atau sasaran organisasi.

Faktor Penghambat

Situasi di lapangan yang terkadang berbeda dengan apa yang sudah direncanakan dan ditargetkan dari awal, membuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai PUPR tidak bisa terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Alamsyah, Dedi. 2011. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Asy'ari, S.I.. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Berry, L. Leonard and Parasuraman. 1995. *A Marketing Services*. New York: The Free Press.
- Departemen Koperasi. 1994. *Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992*.
- Dunn, William N.. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gibson, Ivanovich Donnely. 1991. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujid. 2009. *Problematisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran*. Yogyakarta: Publik Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Kaho, Josef Riwo. 2005. *Prospektif Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 1996. Jakarta: Balai Pustaka 3685.
- Leibo, Jefta. 1994. *Sosiologi Pedesaan mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Rosyidi, Suherman. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Seyadi. 2003. *BUMDes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Strauss, A. dan Corbin, J. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Primatama.
- Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007.

- Thoha, Miftah. 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jilid II)*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Negara)*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang:Bayumedia.